

# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN DEDAI

JL. Dedai – Buluh Merindu Kode Post-78693

#### KEPUTUSAN CAMAT DEDAI KABUPATEN SINTANG

#### NOMOR 21 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

#### RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

#### CAMAT DEDAI KABUPATEN SINTANG,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Dedai;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

8. Peraturan...

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor )

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU

:

yang selanjutnya disebut : (1) Rencana Strategis **RENSTRA** KECAMATAN DEDAI Tahun 2016-2021 ini adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KECAMATAN DEDAI Kabupaten Sintang selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) Renstra...

- (2) RENSTRA KECAMATAN DEDAI Kabupaten Sintang ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- (3) RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini disusun berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 2021.

**KEDUA** 

RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Visi dan Misi KECAMATAN DEDAI Tahun 2016-2021.
- b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan kebijakan KECAMATAN DEDAI periode 2016-2021.
- c. .Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016-2021.
- d. Indikator Kinerja KECAMATAN yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

**KETIGA** 

Kepala beserta seluruh staf di lingkungan KECAMATAN DEDAI Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RENSTRA KECAMATAN ini secara konsisten, bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.

**KEEMPAT** 

: Dalam hal substansi RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RENSTRA KECAMATAN tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan kedalam RENJA KECAMATAN DEDAI.

**KELIMA** 

- : (1) RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.
  - (2) RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Dedai pada tanggal 1 Juni 2016



#### Tembusan Yth:

- 1. Bupati Sintang
  - u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang;
- 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
- 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT DEDAI

NOMOR : 21 TAHUN 2019 TANGGAL : 1 JUNI 2019 TENTANG : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN

DEDAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 – 2021

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DEDAI **KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 – 2021**



# RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021

Disusun Oleh

KECAMATAN DEDAI 2016 KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan

rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dedai

Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana

Strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima)

tahun, tahun 2016 s/d 2021 dan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian

kinerja Kantor Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan

tantangan ke depan yang dihadapi Kantor Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang

sebagai upaya untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Pembangunan

Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Sebagai pedoman pelaksanaan, program dan kegiatan dalam Renstra

diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran,

sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan

sasaran yang sudah ditetapkan Kantor Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan Dedai masih

banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan koreksi yang kontruktif dan

positif dari berbagai pihak sebagai bahan review penyusunan Renstra ini.

Dedai.

Mei 2016

**CAMAT DEDAI** 

Drs. SUBENDI, M. Si

Pembina

NIP. 19670621 199003 1 0062

i

# **DAFTAR ISI**

BAB II	I.1. I.2. I.3. I.4.  GAME II.1. II.2. II.3. II.4.	AHULUAN  Latar Belakang  Landasan Hukum  Maksud Dan Tujuan  Sistematika Penulisan  ARAN PELAYANAN KECAMATAN DEDAI  Tugas Pokok, Fungsidan Struktur Organisasi  Sumber Daya  Kinerja Pelayanan Kecamatan Dedai  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan		
	I.2. I.3. I.4. GAME II.1. II.2. II.3. II.4.	Landasan Hukum		
	I.3. I.4. GAME II.1. II.2. II.3. II.4.	Maksud Dan Tujuan		
	I.4.  GAME II.1. II.2. II.3. II.4.	Sistematika Penulisan		
	GAME II.1. II.2. II.3. II.4.	Tugas Pokok, Fungsidan Struktur Organisasi Sumber Daya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dedai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan		
	II.1. II.2. II.3. II.4.	Tugas Pokok, Fungsidan Struktur Organisasi		
	II.2. II.3. II.4.	Sumber Daya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dedai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan		
n.n	II.3. II.4.	Kinerja Pelayanan Kecamatan Dedai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan		
D. D. V.V.	II.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan		
D. A. D. J. V.				
D 4 D 444	ISU-IS			
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI			
	III.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan		
	III.2.	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		
	III.3.	Penentuan Isu-Isu Strategis		
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
	KECA	MATAN DEDAI		
	IV.1.	Visi Dan Misi Kecamatan Dedai		
	IV.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dedai		
	IV.3	Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Dedai		
BAB V	RENC	ANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,		
<b>2112</b>	KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF			
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DA SASARAN RPJMD			
DADAW	DENIE	TUP		

# BAB I PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan prasyarat utama bagi aparatur pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokratis yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu dibutuhkan penetapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung tertib, bersih dan dapat dipertanggung jawabkan, yang dikelola dengan efesien, efektif, transparan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lazim disebut dengan Renstra SKPD adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahun mendatang yaitu tahun 2016 – 2021 yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh komponen organisasi untuk dimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebuah keharusan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum, Kecamatan Dedai mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses Pelayanan Prima dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendisendi tatalaksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Dedai . Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Dedai dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Dedai yang mampu memberikan pelayanan prima secara profesional yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra Tahun 2016-2021 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dedai yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

#### I.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tamabah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4700);
- 7. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan Standar pelayanan Manimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
   Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
   Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
- 14. Perauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816;
- 16. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Peleksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang penyelenggaran Penata Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
- 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;

- 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
- 27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;
- 28. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

#### I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Dedai dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Dedai dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Dedai; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

#### I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai herikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEDAI

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organsiasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari Kecamatan Dedai.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DEDAI

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dedai, telaahan visi, misi dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dedai

Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Dedai Tahun 2016 – 2021.

### BAB VII PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dedai dapat dilaksanakan secara Baik dan Benar.

#### BAB II

#### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEDAI

#### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penjabaran mengenai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang nomor 2);

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
- b. Penyelenggaraan pembangunan
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundangundangan;
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perlimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kecamatan dengan Organisasi Kecamatan Dedai terdiri dari :

- a. Camat Dedai
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari;
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan program;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Perlengkapan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Perlayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1. Camat

#### a. Tugas Pokok

Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan ini, Camat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat,

- pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta usulan sekretariat kecamatan;
- Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan
   Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan Umum, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan;
- d. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

#### 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas sebagian tugas Kecamatan di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan dan Program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 9 peraturan ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, urusan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelola urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pembendaharaan,
   yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban
   keuangan Kecamatan;
- d. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

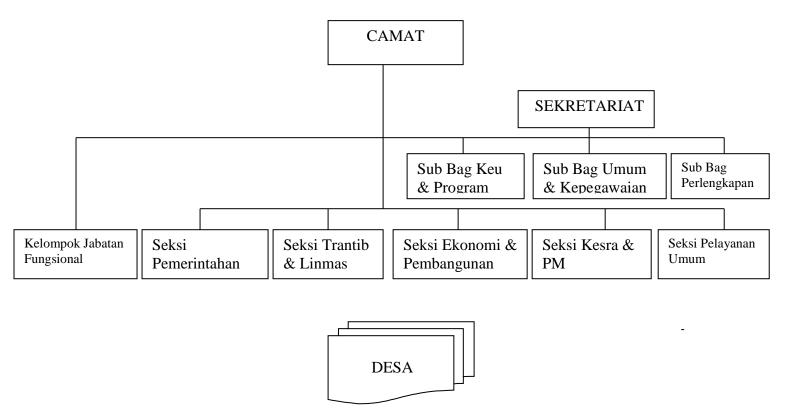
#### 3. Tata Kerja Kecamatan Dedai

- Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masingmasing.
- 2. Setiap pimpinan satuan oerganisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan nsesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kantor Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

#### 4. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Dedai

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dedai bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DEDAI



#### 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dedai

#### a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kecamatan Dedai terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kecamatan Dedai menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel 2.1**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Desember 2015)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	13
2	Perempuan	2
	15	

**Tabel 2.2** Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	3
3	D3	1
4	D2	1
3	SLTA	6
4	SLTP	1
5	SD	
	15	

**Tabel 2.3**Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum	7
2	Spada	-
3	Spama / Diklatpim III	1
4	Diklat Pim IV	1
	9	

**Tabel 2.4**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	1
	Jumlah	11
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	3
5	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	
	Jumlah	1
6	CPNS:	
	- Penata Muda (III/a)	-
	- Pengatur (II/c)	-
	- Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	
	Jumlah Keseluruhan	15

#### b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dedai. Hingga saat ini, Kecamatan Dedai memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Dedai telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Dedai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

# Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Dedai (Posisi Per Desember 2015)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	3	1 Buah Kantor 1 Buah Gg Serbaguna 1 Buah Rumah Dinas
2	Kendaraan Dinas Roda (Empat)	1	
	Kendaraan Roda Dua		
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	15	
3	Komputer Laptop	12	
4	Komputer (Personal Computer)	1	
5	Mesin Ketik Manual	-	
6	AC	4	
7	TV Berwarna	1	
8	Mesin Genset	1	
9	Rak Buku	-	
10	Kamera Digital	-	
11	Meja Kerja Pimpinan 1 biro	6	
12	Wireless	1	
13	Brankas	1	
14	Filling Cabinet	8	
15	Almari Kayu / Besi	2	
16	Meja kursi Tamu	2	
17	Meja Kerja ½ biro	20	
18	Kursi Kerja	10 Buah	
19	Meja Rapat	3 Buah	
20	Kursi rapat	101 Buah	
21	Jam dinding	-	
22	Radio SSB	1 Buah	
23	Kipas Angin	8	
24	Stabilisator	1	Baik
25	UPS	1	
26	Printer	8	Baik
27	Invocus	1	
28	Sound Sistem	1 set	
29	Mesin Rumput	1 Buah	
30	Teralis besi		

#### c. Sistem Prosedur Mekanisme

Sistem prosedur dan mekanisme kerja Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang berpedoman kepada Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dedai

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Dedai. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dedai dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja yaitu:

- 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Dari Indikator Kinerja Kecamatan Dedai sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa Kinerja Kecamatan Dedai sebagaimana tersebut di bawah ini :

- ➤ Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan
  - Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari
  - 2. Memberikan kesempatan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk mengikuti Diklat, Pendidikan dan Kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya
  - 3. Pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan Desa
  - 4. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitandengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan di Desa
  - 6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin Pemerintahan Desa
  - 7. Memfasilitasi adanya Pemekaran Desa di setiap Desa.
- Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
  - 1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan

- Musrenbang Kecamatan
- 2. Monitoring Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan Dedai
- 3. Monitoring Penyaluran Beras Raskin
- Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan
   BLSM di Wilayah Kecamatan Dedai
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
- 6. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Dedai.

#### Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

- Terlaksananya pembinaan Pelayanan Sosial, Pemuda dan Olahraga di Wilayah Kecamatan
- Terlaksananya pembinaan Kerukunan Beragama, Bernegara, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan cara giat menabung melalui Kredit Union (CU)
- 3. Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Masyarakat Desa.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Dedai dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Peluang.

- Kepemimpinan Pejabat Kecamatan yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pelayanan prima yang profesional di Kecamatan Dedai.
- b. Terjadinya hubungan yang harmonis antar Unsur Pimpinan Kecamatan dan staf, sehingga terciptanya koordinasi yang kuat.
- c. Tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diberikan.
- d. Adanya kekompakan dan motivasi kerja staf yang cukup tinggi.
- e. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

- f. Masih tersedianya lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian maupun lahan perkebunan, dan tersedianya lahan dataran rendah yang berpotensi untuk usaha perikanan, seperti pengembangan kolam ikan.
- g. Di sekitar ibukota Kecamatan peluang pertumbuhan perekonomian semakin pesat, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan.

#### 2. Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan yang beragam dari masyarakat yang harus ditampung dan dilayani dengan segera.
- Belum tersedianya fasilitas dan sarana penunjang kerja yang memadai.
- c. Masih kurangnya kemampuan sumber daya pegawai Kecamatan dalam melayani masyarakat.
- d. Masih kurangnya kemampuan sumber daya aparatur Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- e. Kurang harmonisnya hubungan dan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dan Perangkatnya serta antara Kepala Desa dan Sekdes atau Perangkatnya.
- f. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- g. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan, akan sangat berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak investor/perusahaan.
- h. Adanya pengolahan lahan yang sebagian besar telah dikelola untuk perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan semakin menyempitnya ketersediaan lahan untuk pengelolaan komoditi lainnya.

#### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DEDAI

#### III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Dedai selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dedai sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan tugas Kecamatan di bidang administrasi keuangan, penyusunan program, penataan surat menyurat, pelayanan administrasi kepegawaian, penataan aset dan pemeliharaan perlengkapan belum sepenuhnya dapat terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pegawai yang membidangi tugasnya serta kurang didukung oleh sarana penunjang kerja yang memadai, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan urusan kesekretariatan belum dapat dilakasanakan secara maksimal.
- 2. Koordinasi penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat, penyusunan rencana pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum, masih belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh luasnya lingkup tugas pelayanan di Kecamatan serta adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan desa dari Bupati Kepada Camat sebagai perangkat daerah. Akibatnya penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan belum dapat terselenggara dengan efektif.
- 3. Rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif, sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sering dijumpai terjadinya salah sasaran.
- 4. Kompetensi aparat Kecamatan yang masih belum memadai apabila dilihat dari pendidikan, dedikasi, pengalaman mengikuti diklat, bimbingan teknis, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.

- 5. Kemampuan aparatur desa dan anggota BPD masih belum memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- 6. Masih kurangnya dokumen peraturan perundang-undangan sebagai referensi untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas, sehingga berdampak pada terhambatnya kualitas penyelenggaran pelayanan prima.

#### III.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Regelius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021"

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

**Cerdas** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat baik jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan.Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

**Maju** adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan

lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang.

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang tercapainya digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menegah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif,

efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diKabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal
- 2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
- 3. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur dasar guna pengembangan potensi Ekonomi dan sumber daya Daerah.
- 4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan pengamalan Agama dalam kehidupan sosial.
- 6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dedai maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

**Tabel 3.1**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi	6 Tata Kelola Pemerintahan ya	ng Baik dan Bersih		
N.a	Misi dan Prime Mover	Downsoalakan Dalawanan CVDD	Faktor	
No	KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6:			
2.	Menata dan mengembangkan	Belum optimalnya Peran Pemerintah		
	Manajemen Pemerintah	Kecamatan		
	Daerah yang sesuai	dalam melaksanakan		
	dengan prinsip Tata	Tata Kelola		
	Kelola Pemerintahan	Pemerintahan yang		
	yang baik dan bersih.	baik dan bersih		
	- Program pelayanan administrasi perkantoran	belum optimalnya fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik	Kualitas pelayanan administrasi	Kebutuhan organisasi
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima	Kemampuan dana	Tuntutan pelayanan
	- Program peningkatan disiplin aparatur	Belum terwujudnya disiplin aparatur Kecamatan dalam menunjang pelayanan prima	Reward and Punishment	Kebutuhan kualitas SDM
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Minimnya Bimtek/Diklat	Kebutuhan kualitas SDM
	- Program pelaksanaan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat	Belum optimalnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi tugas antar lembaga/instansi pemerintah.	Ego sektoral	Dukungan aturan sebagai landasan hukum

#### III.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Dedai sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia/pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja untuk mendukung pelayanan prima.

- c. Lemahnya penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan perumusan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Belum memadainya kemampuan sumber daya aparatur desa dan anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif.

#### **BAB IV**

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN DEDAI

#### IV.1. Visi Dan Misi Kecamatan Dedai

#### 1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organsiasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pelayanan publik, visi Kecamatan Dedai harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Kecamatan Dedai sebagai berikut:

# Visi:

KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

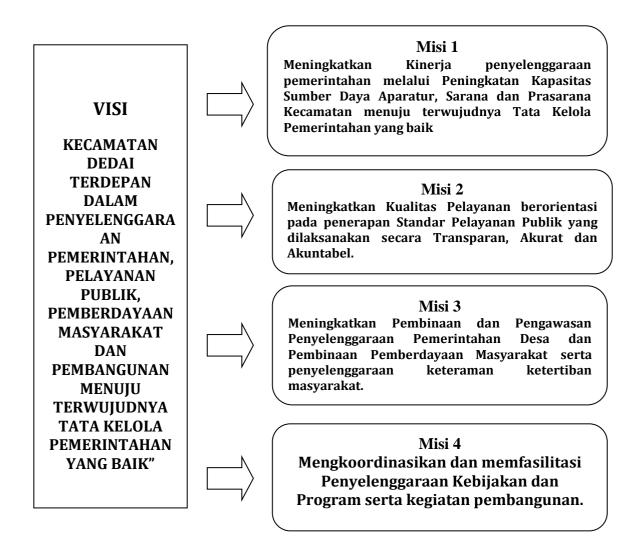
#### 2. Misi

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut di atas dan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2016-2021, maka ditetapkan Misi Kecamatan Dedai, sebagai berikut:

- Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.
- 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.
- 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan.

#### 3. Keterkaitan Visi dan Misi

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



#### IV.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang

ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada Misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Dedai dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang i

Keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan dan Sasaran dari Rencana strategi (Renstra) Kecamtan Dedai Tahun 2016-2021 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Viei Miei Tuinen Cossus				
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	
	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan	Mewujudkan Peningkatan Kinerja	Terwujudnya Peningkatan Kinerja	
KECAMATAN DEDAI	pemerintahan melalui	penyelenggaraan	penyelenggaraan	
TERDEPAN DALAM	Peningkatan Kapasitas	Pemerintahan melalui	Pemerintahan melalui	
PENYELENGGARAAN	Sumber Daya Aparatur,	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	
PEMERINTAHAN,	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Aparatur,	Sumber Daya Aparatur,	
PELAYANAN PUBLIK,	Kecamatan menuju	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana	
PEMBERDAYAAN	terwujudnya Tata Kelola	Kecamatan menuju	Kecamatan menuju	
MASYARAKAT DAN	Pemerintahan yang baik	terwujudnya Tata	terwujudnya Tata Kelola	
PEMBANGUNAN	Temermanan yang bark	Kelola Pemerintahan	Pemerintahan yang baik.	
MENUJU		yang baik	r ciner intanan yang baik.	
TERWUJUDNYA TATA	Meningkatkan Kualitas	Mewujudkan	Terwujudnya	
KELOLA	Pelayanan berorientasi	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas	
PEMERINTAHAN	pada penerapan Standar	Pelayanan kepada	Pelayanan kepada Masy.	
YANG BAIK"	Pelayanan Publik yang	Masyarakat dengan	dengan menerapkan	
-	dilaksanakan secara	menerapkan Standar	Standar Pelayanan	
	Transparan, Akurat dan	Pelayanan Publik yang	Publik yang	
	Akuntabel.	dilaksanakan secara	dilaksanakan secara	
		Transparan, Akurat dan	Transparan, Akurat dan	
		Akuntabel	Akuntabel	
	Meningkatkan	Mewujudkan	Terwujudnya	
	Pembinaan dan	Peningkatan Kegiatan	Peningkatan Kegiatan	
	Pengawasan	Pembinaan dan	Pembinaan dan	
	Penyelenggaraan	Pengawasan terhadap	Pengawasan terhadap	
	Pemerintahan Desa dan	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Pem.	
	Pembinaan	Pemerintahan Desa dan	Desa dan Pembinaan	
	Pemberdayaan	Pembinaan dalam	dalam rangka	
	Masyarakat serta	rangka Pemberdayaan	Pemberdayaan	
	penyelenggaraan	Masyarakat	Masyarakat serta	
	keteraman ketertiban	penyelenggaraan serta	penyelenggaraan	
	masyarakat.	penyelenggaraan	keteraman ketertiban	
		keteraman ketertiban	masyarakat.	
		masyarakat.		
	Mengkoordinasikan dan	Mewujudkan Fungsi	Terwujudnya Fungsi	
	memfasilitasi	Koordinasi dan	Koordinasi dan	
	Penyelenggaraan	melaksanakan Fasilitasi	Pelaksanaan Fasilitasi	
	Kebijakan dan Program	terhadap	terhadap	
	serta kegiatan	Penyelenggaraan	penyelenggaraan	

pembangunan.	Kebijakan dan	Kebijakan dan Program
	Program serta kegiatan	serta kegiatan
	pembangunan	pembangunan
	Pemerintah Daerah	Pemerintah
	Kabupaten Sintang	Daerah Kab, Sintang

## IV.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dedai

## a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkanm Visi dan Misi. Kecamatan Dedai dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan
- 3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik
- 4. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 5. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
- 6. Memantapkan Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

### b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2. Pengadaan Saranadan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
- 3. Pengadaan Saranadan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
- 4. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik

- 5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
- 7. Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait
- 8. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

masyarakat

# Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	i ujuan, Sasaran, Stra	itegi, dan Kebijakan	
Visi : KECAM	ATAN DEDAI TERDEPAN I	DALAM PENYELENGGARA	AN PEMERINTAHAN,
PELAYA	ANAN PUBLIK, PEMBERDA	YAAN MASYARAKAT DAN	N PEMBANGUNAN
MENUJI	U TERWUJUDNYA TATA KI	ELOLA PEMERINTAHAN Y	YANG BAIK"
	katkan Kinerja penyelen		
Kapasit	tas Sumber Daya Aparatu		a Kecamatan menuju
	ıdnya Tata Kelola Pemeri	ntahan yang baik.	T
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan	Terwujudnya	1. Meningkatkan	1. Peningkatan
Peningkatan Kinerja	Peningkatan Kinerja	Kapasitas Sumber	Kapasitas
penyelenggaraan	penyelenggaraan	Daya Aparatur	Sumber Daya
Pemerintahan melalui	Pemerintahan melalui	O Marria alantlara	Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Peningkatan Kapasitas	2. Meningkatkan Sarana dan	2 Pengadaan Sarana dan
Sumber Daya Aparatur, Sarana dan	Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana	Prasarana	Prasarana
Prasarana Kecamatan		Kecamatan	Perlengkapan
menuju terwujudnya	Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola	Recalliatali	Kantor
Tata Kelola	Pemerintahan yang baik.		Penunjang
Pemerintahan yang	Temer intanan yang bank.		Kerja
baik			Refju
buik			
Mening	katkan Kualitas Pelaya	nan berorientasi pada	penerapan Standar
	nan Publik yang dilak		
Akunta			•
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan	Terwujudnya	1. Menerapkan Standar	1. Penguatan
Peningkatan	Peningkatan Kualitas	Pelayanan Publik	Penerapan Standar
Kualitas Pelayanan	Pelayanan kepada		Pelayanan Publik
kepada Masyarakat	Masy. dengan		
dengan menerapkan	menerapkan Standar		2. Pengadaan Sarana
Standar Pelayanan	Pelayanan Publik		dan Prasarana
Publik yang dilaksanakan secara	yang dilaksanakan		Pendukung
Transparan, Akurat	secara Transparan, Akurat dan		Pelayanan Publik
dan Akuntabel	Akuntabel		i elayanan i ublik
	katkan Pembinaan dan		
Desa o	lan Pembinaan Pember	•	rta penyelenggaraan
	nan ketertiban masyaraka		T
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan	Terwujudnya	1. Meningkatkan	1. Peningkatan
Peningkatan	Peningkatan Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Kegiatan Pembinaan	Pembinaan dan	Pembinaan dan	Pembinaan dan
dan Pengawasan terhadap	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan	Pengawasan terhadap	Pengawasan terhadap
Penyelenggaraan	Pem. Desa dan	Penyelenggaraan	Penyelenggaraa
Pemerintahan Desa	Pembinaan dalam	Pem. desa	n Pem. Desa
dan Pembinaan	rangka	2 Meningkatkan	2. Peningkatan
dalam rangka	Pemberdayaan	Pembinaan dalam	Pembinaan
Pemberdayaan	Masyarakat serta	rangka	dalam rangka
Masyarakat	penyelenggaraan	Pemberdayaan	Pemberdayaan
penyelenggaraan	keteraman ketertiban	Masyarakat	Masyarakat
serta	masyarakat.	3. Meningkatkan	3. Peningkatan
penyelenggaraan		Pembinaan dalam	Pembinaan
keteraman		penyelenggaraan	dalam
ketertiban		keteraman	penyelenggaraa
masyarakat.		ketertiban	n keteraman
		masyarakat.	ketertiban

	koordinasikan dan		Penyelenggaraan
Kebija	ikan dan Program ser	ta kegiatan pemban	gunan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Fungsi	Terwujudnya Fungsi	Meningkatkan	Peningkatkan
Koordinasi dan	Koordinasi dan	partisipasi	partisipasi
melaksanakan Fasilitasi	Pelaksanaan Fasilitasi	masyarakat dalam	masyarakat dalam
terhadap	terhadap	perencanaan	perencanaan
Penyelenggaraan	penyelenggaraan	pembangunan	pembangunan
Kebijakan dan	Kebijakan dan		
Program serta kegiatan	Program serta		
pembangunan	kegiatan		
Pemerintah Daerah	pembangunan		
Kabupaten Sintang	Pemerintah Daerah		
	Kab. Sintang		

## **BAB V**

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Dedai tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

#### TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD KECAMATAN DEDAI TAHUN 2016 - 2021

						Data Capaian pada						Target Kine	rja Progra	ım dan Kerangk	a Pendan	aan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun Awal Perencanaan		2016		2017		2018		2019		2020		2021	akhir p	periode Renstra	SKPD Penanggung	Lokasi
						(2015)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju	kebutuhan kantor dalam		Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.		1.20.1.20.13.01.01	1 Pemyedian Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Materai dan Benda Pos lainnya	915,000	100%	985,000	100%	891,000	100%	980,100	100%	1,078,110	100%	1,185,921	100%	1,304,513	100%	1,434,964	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
r cinci intanan yang baik		2. Tersedianya dokumen rencana,	1.20.1.20.13.01.02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dar listrik	Tersedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,800,000	100%	6,600,000	100%	8,500,000	100%	9,350,000	100%	10,285,000	100%	11,313,500	100%	12,444,850	100%	13,689,335	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		program, kegiatan, laporan hasil kegiatan dan dokumen tiap sub	1.20.1.20.13.01.05	3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	2,750,000	100%	2,000,000	100%	2,200,000	100%	2,420,000	100%	2,662,000	100%	2,928,200	100%	3,221,020	100%	3,543,122	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		bagian dan seksi	1.20.1.20.13.01.08	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pemersih serta Tenaga Kebersihan Kantor	36,784,926	100%	31,531,000	100%	31,531,000	100%	34,684,100	100%	38,152,510	100%	41,967,761	100%	46,164,537	100%	50,780,991	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.10	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedian Alat Tulis Kantor	15,881,849	100%	16,407,600	100%	22,882,750	100%	25,171,025	100%	27,688,128	100%	30,456,940	100%	33,502,634	100%	36,852,898	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		3. indeks pelayanan	1.20.1.20.13.01.11	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedian barang cetakan dan penggandaan	12,827,225	100%	9,440,500	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		skpd meningkat.	1.20.1.20.13.01.12	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangar bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturar	listrik/penerangan bangunan	3,667,500		1,220,000	-	1,220,000		1,342,000	100%	1,476,200	100%	1,623,820	100%	1,786,202	100%	1,964,822	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.15	perundangundangan	perundangundangan	960,000	100%	960,000		1,500,000	100%	1,650,000	100%	1,815,000	100%	1,996,500	100%	2,196,150	100%	2,415,765	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.17	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedian makanan dan Snack	15,125,000	100%	9,075,000	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%	24,157,650	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.18	10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65,335,000	100%	87,660,000	100%	75,755,250	100%	83,330,775	100%	91,663,853	100%	100,830,238	100%	110,913,262	100%	122,004,588	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.19	11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	g Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	-	100%	17,400,000	1	34,800,000		38,280,000	100%	42,108,000	100%	46,318,800	100%	50,950,680	100%	56,045,748	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.31	12 Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan Pembinaan Kedalam daerah	-	100%	121,430,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.36	13 Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya Pembinaan Kedalam daerah	-	100%	9,228,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.44	14 Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanar Perkantoran	Tersediannya Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan	-	100%	20,400,000	100%	-	100%	-	-	-	-		-	-	-	-		KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.45	15 Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan/Penjaga Malam	Terlaksananya Jasa Tenaga Kebersihan/Penjaga Malam	12,120,000		15,000,000		15,000,000		16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%	24,157,650	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.47	16 Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Tersedian Bahan Bakar Minyak danj Gas	1,925,000	100%	15,555,000	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju	Menunjang Pelayanan		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1																	
Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola	terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	Publik dan Pengelolaan	1.20.1.20.13.02.01	1 Pembangunan rumah jabatan	Tersedian Rumah Dinas Camat			500,000,000	100%		100%	-	-	-			-		_	-		KEC.DEDAI
Pemerintahan yang baik		Administrasi	1.20.1.20.13.02.07	2 Pengadaan Perlengkapam Gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	43,000,000	100%															KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.09	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedian Peralatan gedung kantor	-		28,050,000	100%	48,500,000	100%	53,350,000	100%	58,685,000	100%	64,553,500	100%	71,008,850	100%	78,109,735	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		2. Tersedianya	1.20.1.20.13.02.10	4 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	-		1,500,000	100%	57,000,000	100%	62,700,000	100%	68,970,000	100%	75,867,000	100%	83,453,700	100%	91,799,070	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		pemeliharaan perangkat penunjang	1.20.1.20.13.02.22	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	-		14,000,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		kerja dan perlengkapan kantor	.20.1.20.13.02.24	6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpiinaranya kendaraan dinas/operasionai	11,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.31	7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dar perlengkapan kantor	Terpiliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,500,000	100%	1,650,000	100%	1,815,000	100%	1,996,500	100%	2,196,150	100%	2,415,765	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI

																		•				
			1.20.1.20.13.02.58	8 Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Terpiliharanya Perangkat Komputer dan Printer	5,000,000	100%	4,500,000	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	8,052,550	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.64	9 Pembangunan Pagar Kantor	Tersedian Pagar dan Papan Nama Kantor	100,000,000	100%	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	KEC.DEDA
			1.20.1.20.13.02.80	10 Penataan Halaman Kantor	Terlaksananya Halaman Kantor	200,000,000	100%	-	100%	200,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	KEC.DEDA
			1.20.1.20.13.02.81	11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedian Kendaraan Dinas/Operasional	17,000,000	100%	63,140,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.02	12 Pembagunan Gedung Serbaguna Kecamatan Dedai	Tersedianya Gedung Serbaguna Kecamatan Dedai		100%	-		-	100%	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan		tersedianya penunjang kerja dalam		Program peningkatan disiplin aparatur																		
Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas	meningkatkan disiplin aparatur	1.20.1.20.13.03.04	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas	8,400,000	100%		100%	8,700,000	100%	9,570,000	100%	10,527,000	100%	11,579,700	100%	12,737,670	100%	14,011,437	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.		1.20.1.20.31.03.05	2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik dan Olahraga			3,800,000	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya bimtek dan pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																		
Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	penyelenggaraan remerintanan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	kapasitas sumber daya aparatur.	1.20.1.20.13.05.01	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Diklat Yang Dapai Meningkatkan Kemampuan PNS	65,690,000	100%	87,160,000	100%	95,000,000	100%	104,500,000	100%	114,950,000	100%	126,445,000	100%	139,089,500	100%	152,998,450	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi	1.20.1.20.13.06.01	1 Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Laporan Lakip,Renja Prognosis dan Laporan Keuangan Akhii Tahun		100%	3,370,000	100%	3,370,000	100%	3,707,000	100%	4,077,700	100%	4,485,470	100%	4,934,017	100%	5,427,419	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan akuntabel			Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat																		
secara Transparan, Akurat dan Akuntabel			1.20.1.20.13.28.00	Penunjang Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala		25,437,500	100%		100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	KASI	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.02	Daerah  Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan	Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pembinaan Ketertiban dar Keamanan Dalam Masyarakat Desa dar	1		12,920,000	100%	20,000,000	<del>                                     </del>	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	TRANTIB KASI TRANTIB	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem.		1.20.1.20.13.28.06	3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD	Pembinaan Untuk Hansip Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD	9,372,500	100%	5,352,500	100%	17,500,000	100%	19,250,000	100%	21,175,000	100%	23,292,500	100%	25,621,750	100%	28,183,925	KASI PEM	KEC.DEDAI
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam	Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan		1.20.1.20.13.28.09	4 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tapa Batas Desa se Kecamatan Dedai	9,075,000	100%	5,600,000	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	KASI PEM	KEC.DEDAI
rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan serta penyelenggaraan			1.20.1.20.13.28.10	5 Kegiatan Inventarisasi Aset Desa	Tersedianya data Inventarisir Aset-aset Desa Se Kecamatan Dedai	15,660,000	100%	7,560,000	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%	24,157,650	KASI PELUM	KEC.DEDAI
keteraman ketertiban masyarakat.		Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan	1.20.1.20.13.28.18	6 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan yang partisipatif di tingkat desa dan kecamatan	22,130,000	100%	29,510,000	100%	45,000,000	100%	49,500,000	100%	54,450,000	100%	59,895,000	100%	65,884,500	100%	72,472,950	KASI EKBANG	KEC.DEDAI

			1.20.1.20.13.28.22	7	Pembinaan dan Pengembangan serta pemantauan Kegiatan. Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Kepariwisata	Terlaksananya Pemb & Pengawasan serta Pemantauan Kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertamben & Pariwisata	7,700,000	100%	5,390,000	100%	17,000,000	100%	18,700,000	100%	20,570,000	100%	22,627,000	100%	24,889,700	100%	27,378,670	KASI EKBANG	KEC.DEDAI
		Prosentase keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	1.20.1.20.13.28.35	8	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13,380,000	100%	13,925,000	100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000	100%	43,923,000	100%	48,315,300	KASI KESRA	KEC.DEDAI
Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta	-	1.20.1.20.13.28.45	9	Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Prog.Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Peranan wanita	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, olah raga, kebudayaan, Pramuka serta peranan wanita	11,637,500	100%	12,200,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	KASI KESRA	KEC.DEDAI
kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang		1.20.1.20.13.28.52	10	Rapat Kerja Camat dengan Lurah / Kepala Desa	Terlaksananya Rapat Kerja Camat dengan Lurah/Kades	9,337,500	100%	-		9,566,500	100%	10,523,150	100%	11,575,465	100%	12,733,012	100%	14,006,313	100%	15,406,944	KASI PEM	KEC.DEDAI
Sintang		-	1.20.1.20.13.28.56	11	Penyuluhan dan Peringatan PKK	Terlaksananya Penyuluhan dan Peringatan PKK	21,875,000	100%	23,360,925	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	KASI KESRA	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.57		Pembinaan, Evalusi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	Terlaksanannya Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	27,580,000	100%	33,365,000	100%	39,000,000	100%	42,900,000	100%	47,190,000	100%	51,909,000	100%	57,099,900	100%	62,809,890	KASI PEM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.58	13	Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa	Terlaksananya Lomba Desa TK Kecamatan	-		-		25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	33,275,000	100%	36,602,500	100%	40,262,750	KASI KESRA	KEC.DEDAI
		_	1.20.1.20.13.28.59	14	Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan PBB Di Kecamatan		100%	19,008,005	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	100%	35,431,220	KASI KESRA	KEC.DEDAI
		<u>-</u>	1.20.1.20.10.28.61	15	Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan Kelam Permai	1,000,000	100%	1,000,000	100%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASI PEM	KEC.DEDAI
		_	1.20.1.20.13.28.63	16	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Di Kecamatan	11,320,000	100%	15,885,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	33,275,000	100%	36,602,500	100%	40,262,750	KASI EKBANG	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.75	17	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa	15,350,000	100%	5,965,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	KASI PEM	KEC.DEDAI
		-	1.20.1.20.13.28.89	18	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terpenuhi pelayanan terhadap masyarakat					20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	KASI PELUM	KEC.DEDAI
	Terwujuanya Peningkatan Kegiatan																						
Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan	Terlaksananya Peringatan Hari Besar		Pro	gram Peringatan Hari Besar Nasional																		
Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	keteraman ketertiban masyarakat.	Nasional di Lingkungan Kecamatan	1.20.1.20.13.29.02		Kegiatan HUT Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan	49,337,500	100%	49,535,000	100%	65,000,000	100%	71,500,000	100%	78,650,000	100%	86,515,000	100%	95,166,500	100%	104,683,150	KASI KESRA	KEC.DEDAI
	I			1		TOTAL	896,024,000		1,326,988,530		1,313,416,500		1,919,758,150		1,336,733,965		1,445,407,362		1,586,948,098		1,742,642,907		

### **BAB VI**

# INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DEDAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kecamatan Dedai yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera melalui VISI Kecamatan Dedai **KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK",** maka dipandang perlu disusun Penetapan Indikator Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengacukan pada Tujuan dan Sasaran Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat Dedai Kabupaten Sintang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang. Penetapan Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan Indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan mempertimbangkan waktu pencapaiannya.

Adapun Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Dedai Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

TABEL 6.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN SASARAN
KECAMATAN DEDAI

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			GET CAPAIAI				KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN 2015	TAHUN	TAHUN 2015	
(1)	(2)	(3)	2015 (4)	2015 (5)	2015	2015	(8)	2015 (9)	(10)	(11)
	(2)	(3)	(+)	(3)	(0)	(7)	(0)		(10)	(11)
1.	Terwujudnya	Jumlah Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh								
	Peningkatan Kinerja	Pegawai/ Aparatur Kecamatan  Bimtek Pengelolaan Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	2 org
	penyelenggaraan	Bimtek Pengelolaan Redangan     Bimtek Pengelolaan Barang/ Aset	1 org 1 org	1 org 1 org	1 org 1 org	1 org 1 org	1 org 1 org	1 org 1 org	1 org 1 org	2 org 2 org
	Pemerintahan melalui	Bimtek Kepegawaian dan Arsip	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	2 org
	Peningkatan Kapasitas	➤ Bimtek Lainnya	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	2 org
	Sumber Daya Aparatur,	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana     Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	1019	1018	1019	1018	1018	1018	1018	_ 0.5
	Sarana dan Prasarana	<ul> <li>Pengadaan kendaraan dinas</li> </ul>	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11 unit
	Kecamatan menuju	Pengadaan mebeler	20 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	50 unit
	terwujudnya Tata Kelola	<ul> <li>Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11 unit
	Pemerintahan yang baik.	Pengadaan computer dan printer	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11 unit
	, c	<ul> <li>Pengadaan pakaian dinas</li> </ul>	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
		Pengadaan rumah dinas	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	2 unit
		Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor								
		<ul> <li>Pemeliharaan kendaraan dinas</li> </ul>	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
		<ul> <li>Pemeliharaan perangkat computer dan printer</li> </ul>	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
		Pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok

## Rencana Strategis Kecamatan Dedai 7ahun 2016-2021

2.	Terwujudnya	Persentase Pelayanan Perizinan dan yang tepat	70 %	75 %	80 %	85 %	88 %	90 %	95 %	95 %
-	Peningkatan Kualitas	waktu 2. Persentase Pelayanan Non Perizinan/	70 %	75 %	80 %	85 %	88 %	90 %	95 %	95 %
	Pelayanan kepada Masy.	Administrasi Umum yang tepat waktu	70 %	75 %	80 %	05 %	00 %	90 %	95 %	95 %
	dengan menerapkan	Persentase Pelayanan Administrasi	70 %	75 %	80 %	85 %	88 %	90 %	95 %	95 %
	Standar Pelayanan Publik	Kependudukan yang tepat waktu								
	yang dilaksanakan secara									
	Transparan, Akurat dan									
	Akuntabel									
	Tikulitabel									
3.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyusunan     APBDes dimonitor dan diverifikasi dalam     Pengelolaan ADD	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
	Pembinaan dan	Jumlah Desa yang telah dibina inventarisasi asset desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
	Pengawasan terhadap	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyampaian     SPPT PBB dan Optimalisasi Pemungutan PBB	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
	Penyelenggaraan Pem.	Jumlah Desa yang dinilai dalam Kegiatan     Lomba Desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
	Desa dan Pembinaan	5. Jumlah PKK Desa yang dibina	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
	dalam rangka	Jumlah kegiatan pemberdayaan     Kemasyarakatan yang dibina	-	1	1	1	1	1	1	1 kegiatan
	Pemberdayaan	7. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina		kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	41
	Masyarakat serta	/. Jumian Organisasi Kepemudaan yang dibina	-	1 organsasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	penyelenggaraan	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	31 desa	31 desa	1	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
	keteraman ketertiban				organsasi					
	masyarakat.	9. Jumlah Titik Distribusi Raskin yang dimonitor	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		10. Jumlah Fasilitasi Pengiriman OOSN	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen
		Jumlah Fasilitasi Peringatan Hari Besar     Nasional								
4	Terwujudnya Fungsi	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
4.	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemda Kab. Sintang	Jean yang menasanakan Mastendang	31 uesa	31 desa	31 desa	51 desa	51 desa	51 desa	31 desa	31 desa

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET C.	APAIAN SETI	AP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pelayanan jasa surat menyurat kecamatan Dedai	Belum maksimalnya pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulqn	12 bulan	Terlayaninya pelayanan jasa surat menyrurat
2.	Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan	Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 bulan	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	listrik	listrik	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terciptanya kebersihan kantor, gedung sebaguna, rumah
3.	Penyediaan jasa barang milik daerah	Belum terciptanya kebesihan kantor, gedung serbaguna,						jabatan camat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor Camat Dedai	rumah jabatan camat	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor camat Dedai
4.		Belum terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor camat						Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
	Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Dedai	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
5.	Penambahan jaringan listrik kantor camat Dedai	Belum terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	-	4 bulan	-	-	-	memadai
6.	Pemenuhan komsumsi kebutuhan pegawai/tamu	Belum terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik memadai						
	dan rapat		12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya konsumsi tamu dan kegiatan rapat
7								

Seculation device don between devices device devices de la construction de la company									
Permisshatin pelagranean kepada ayantan dan pelagranaan kendaraan dinas operational dinas behavioraan dinas operational dinas di		Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Tidak terpenuhinya konsumsi kebutuhan pegawai/tamu	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
to the control of the	8.	kedalam daerah dan keluar daerah							
Processed in the profession of the control of the c		Peningkatan pelayanan kepada aparatur dan public		12 tahun	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas opersional				
Despotate incharans dinns operations computer  Personation production computer day  Personation production computer of any order of computer  Personation production computer day  Personation production computer  Personation pro	9.								
Significant fundamental mines operational bocomasts of the Comments of the Com		Pemenuhahn perlengkapan ruang kantor		12 tahun	Tersedianya perlengkapan kantor yang baik dan nyaman				
1. Polish repositions computer due printer proceditants computer due printer proceditant procedi	10.								
Percembany prolation computer of any printer generalization of continued processing of computer of the processing of the processin				12 tahun					
Permitturan perialteran computer dan printer  Peritura faultius range perialteran perialteran computer dan printer  Registant rothshillitat pasitats range perialteran perialteran perialteran computer dan printeral perialteran perialteran perialteran perialteran computer dan printeral perialteran perialteran perialteran delicity perialteran	11.			12.1.1	12.1.1	12.1	12	42.00	
Permithiar computer dan printers  Permithiar computer dan printer  Registers rehabilities contained in the facilities computer in	12	Pemenunan peraiatan computer		12 tanun					
Perpulsan polician improved manter camp today per a personal computer dan distinct reaching per personal presentation of the previous problems and the proposal polician interfacions polician improved manter camp today and per personal presentation of the proposal polician interfacions polician improved manter camp today and personal camps of personal camps of personal camps of personal polician improved manter camps today and personal camps of personal polician improved manter	12.	Pamaliharaan paralatran computer dan printer		_	2 hulan	_	_	_	
Perland facilities round, leep large for letter for the control for the facilities are supported from the facilities and the support of the properties of	12	i ememiai aan peralatran computer dan printer		-	2 Dulan	-	-	-	rersectionity a perifermial and perangkat computer dan printer
1-15   Count of the processing of the processi	15.	Perluas fasilitas ruang keria kantor		_	4 hulan	_	_	_	Tersedianya fasilitas ruang keria kantor memadai
February in the control of the con	14.			_		_	_	_	
Formerwing packain pregoval nations cannot Deals									
Pemeruhan perangkat sound system Pemeruhan perangkat mankat share share perangkat sound system Pemeruhan perangkat rumah tangga hanter Pemeruhan perangkat rumah tangga kanter Pemeruhan perangkat rumah tangga kanter Pemeruhan perangkat rumah tangga kanter Pemeruhan perangkat perang		Kegiatan rehabilitasi gedung serbaguna	Rumah dinas jabatan camat yang rusak dan tidak	-	6 bulan	-	-	-	Tersedianya gedung serbaguna yang memadai
Pervoyelian polation untolk raps dain perferent was placed as region pegoval stater curit. Pedal 20.	16.		memadai	-	3 bulan	-	3 bulan	-	Terpenuhinya pakaian seragam pegawai
18.   Penyedian polation sergam onlah raga   Penyedian polation sergam onlah raga   Penyedian polation sergam onlah raga   Penyedian manah hunga kantor   Penuturan untuk rapat dan pertemuan   Penuturan   Penuturan   Penuturan untuk rapat dan pertemuan   Penuturan   Penuturan   Penuturan untuk rapat dan pertemuan   Penuturan	17.								
Peryodesian Dokumen Engoran ARP dan LAKIP   Peryodesian Dokumen Engoran ARP dan LAKIP   Perususan Dokumen ENTRA   Belan terseedianys polaris anteria perusan dan perapata tumah kursi dan mela   Penenchan pernapata tumah kursi dan mela   Penenchan pernapata tumah tangga kantor   Penenchan penenghan tumah tangga kantor   Penenchan penenghan tersebang penenchan penenchan tersebang penenchan penenchan tersebang penenchan penenchan tersebang penenchan penenchan				-		-	-	-	
Perpussuan Dokumen RENTRA   Beloum terrectionary pollum unturk rapat dan perterman   2 balan				-		-	-	-	
Penyadian kendaran dinas operasional Penyadian kendaran dinas operasional Relamiter escelainaya balkatan kendaran dinas operasional Penyedian kendaran dinas operasional Relamiter especializas kerja Relamiter especiali		Penyediaan Dokumen laporan AKIP dan LAKIP		-		-		-	
Bellum tersedianya dokumen RENTRA dalam melakanakan tugas perasional Podal Pemenuhan perangkat rumat langga kantor Pemenuhan perangkat rumat langga kantor Penyediana tendaran dinas operasional Podal Penyediana dinas operasional Podal Penyediana dinas operasional Podal Penyediana dinas operasional Podal Penyediana disas da penaganan Penyediana Alaksia Bana Desa Penyediangaran penyediana disas da penbinana dinas da pengeriana penyediangaran p		D. D		2 bulan	Tersedianya tolak ukur kenerja kecamatan Dedai				
22   Pemenuhan kurst dan meja   Pemenuhan kurst dan meja   Pemenuhan kurst dan meja   Pemenuhan peranjaci rumah tangga kantor   Pemenuhan peranjaci rumah tangga kantor   Pemenuhan supersional   Pemenuhan supersional roba pemeluhan kadaran dinas operasional   Pemenuhan BBM operasional transportasi kendaran dinas operasional   Pemenuhan BBM operasional transportasi kendaran dinas operasional   Pemenuhan bata desa	21.	Penyusunan Dokumen RENTRA		2 hla				2 h	Tdid-l
Pementhan perangkat rumah tangga kantor Penyediana hendaran dinas operasional Penyediana hendaran dinas operasional Penyediana hendaran dinas operasional Relative tendana dinas and transportasi kendarana dinas operasional Penyediana hendaran dinas operasional Penyediana hendaran dinas operasional Penyediana hendaran dinas operasional Penyediana hendaran dinas operasional rumapat Penyediana hendaran dinas operasional rumapat Penyediana hendaran dinas operasional rumapat Penyediana mangana penyelhana helasi basi desi Penutanan dinas operasional ruda empita Penyelesian masalah basia desi Penutanan dinas operasional ruda empita penyelengaran peneritah desi Penutanan dinas operasional ruda empita penutanan dinas operasional ruga penyelengaran peneritah desi Penutanan dinas operasional ruga penutanan dinas operasi	22	Domonuhan kursi dan maia		2 bulan	-	-	-	2 bulan	Tersedianya dokumen untuk memudan melaksanakan tugas
Pemantapan sumbre daya nanusas 24. Penyediaan kendaranan soperasional 25. Penyediaan kendaranan soperasional 26. Penyediaan kendaranan dinas operasional 27. Pemenhan BBM operasional transportasi 28. Penyediaan pemilihan kades dan BPD 29. Penyediaan masiala batas desa 29. Penyediaan masiala batas masialah mas	22.			_	_	3 bulan	_	_	Tornonuhinya facilitas karia
Penyedian kendaran dinas operasional   Penyedian kendaran dinas operasional   Penyedian kendaran dinas operasional   Penyedian kendaran dinas operasional transportasi   Relum tersedianya kendaran dinas operasional roda empelora   Penyedesian masalah batas desa   Penyedesian masalah batas desa   Penyedesian masalah batas desa   Penyedesian masalah batas desa   Penyedesian administrasi kependudukan   Pe	22			_			2 hulan		
Pemenuhan BBM operasional transportasis kendaraan dinas operasional roda emperasional pemenuhan babb operasional transportasis kendaraan dinas operasional roda emperasional proda emperasional roda emperasional proda emperasional roda emperasional proda emperasional roda emperasional roda emperasional proda emperasional roda emperasi				12 hulan	12 hulan				
Penyedian kendaraan dinas operasional transportasi kendaraan dinas operasional transportasi kendaraan dinas operasional roda dua tersdianaya kendaraan dinas operasional roda dua dua dua resdianaya penyelikades dan BPD		i enyediaan kendaraan dinas operasionar		12 bulan	12 Dulan	12 bulan		12 bulan	
Pementhan BBM operasional transportasi kendaraan dinas operasional roda kendaraan dinas operasional roda kendaraan dinas operasional roda belum tergedinaya kendaraan dinas operasional roda dia pelum tergedinaya bilan dia pelum tergedinaya dia pelum tergedinaya peluman terhadap pengaduan masy peluman terhadap pengaduan masyarakat dia memagapa dia pendan dia pengadapan bilan dia pendan dia pengadapan dia pengadapan dia pengadapan belum matapanya pengadan dia pengadapan belum matapanya pengadan dia pengadapan dia pengadapan belum matapanya pengadan dia pengada		Penyediaan kendaraan dinas operasional			_		3 bulan		rersearanya kendaraan umas operasionar roda empae
Pemeluhan BBM operasional transportasis   Redurana dinas   Pemeluhan Rasa hera pemeluhan kades dan BPD   Pemelenggarana pemelihan kades dan BPD   Pemelenggarana pemelihan kades dan BPD   Pemelenggarana pemelihan kades dan BPD   Pemelengarana pemeluhan pemeluhanan perapakat desa BPD   Pemelanan dan ketertiban   Pemelanan dan ketertiban   Pemelanan ketertiban   Pemelanan dan ketertiban   Pemelanan dan pemelangan pemelanan pemelangan pemelanan dan ketertiban   Rasananan pemelanan pemelangan pemelanan dan ketertiban   Rasananan pemelanan desananan pemelanan desa		,		-	3 bulan	-	-	-	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional roda dua
Rendram dinas   Pengelegaran	27.	Pemenuhan BBM operasional transportasi							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Penyelesajan angana pemilihan kades dan BPD Penyelesajan masalih batas desa Permantapan TUPOKSI perangkat desa Penyelesajan anganan Pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan Pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan pengenganan peminihan and pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan pengenganan peminihan and pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan Amasalah masalah masalah pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan and pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan Amasalah masalah masalah pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan Amasalah masalah pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan Amasalah masalah masalah pengelojaan Alokasi Dana Depeninaan administrasi kependudukan Kurangnya pembinaan administrasi kependudukan Permukan Perangkat desa terhadap TUPOKSI perangkat dalam menjaga Depeninaan bartuan desa dan pengelojaan Masyarakat Sosial Sasia dan pembentukan FKB tingkat kecamatan Dedai Sosial Sasia dan pembangunan Pengelojaan Amasyarakat dalam pembangunan Pengelojaan Masyarakat dalam pembangunan Pengelojaan Masyarakat dalam pembangunan Pengelojaan Masyarakat dalam pembangunan Pengelojaan Penantan Dedai Sasia Pelaksanaan kegistan perkoman pengelojaan Penantan Dedai Sasia Pelaksanaan kegistan perkoman pengelojaan Penantan Dedai Sasia Pelaksanaan kegistan perkoman pengelojaan Penantan Dedai Sasia Penantan Pengelojaan Penantan Dedai Sasia Pelaksanaan pengelimaan Poka dan pengelojaan Penantan Pengelojaan Penantan Dedai Sasia Pelaksanaan pengelimaan Poka dan pengelojaan Penantan Penantan Penantan Sasia Pelaksanaan pengelimaan Poka dan pengelojaan Penantan Penantan Penantan Sasia Pelaksanaan pengelimaan Poka dan Pengelojaan Penantan Penantan Sasia Pelaksanaan pengelimaan Poka dan pengelojaan Penantan Penantan Sasia Pelaksanaan Pengeloja				12 bulan	Tersedianya BBM untuk pelaksanaan tugas pegawai				
Pemantapan TUPOKSI perangkat desa   Pemyelesian administrasi kependudukan   Sosialisasi dan pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa   Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa   Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa   TUPOKSI   Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa   TUPOKSI   Turanggnya pembinaan administrasi kependudukan   Tupoksi   Tupoksi   Turanggnya pembinaan administrasi	28.	Penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD							
Pemantapan TUPOKSI perangkat desa Penyelesaian administrasi kependudukan Desa Penyelesaian administrasi kependudukan Desa Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa Pembinaan ketertiban Alokasi Dana Desa Penyelesian masalah-masalah pengaduan Masyarakat Sosilassi dan pembinan bantuan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa Penyelesian masalah-masalah pengaduan Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan ketertiban Alokasi Dana Desa Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan ketertiban Alokasi Dana Desa Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan ketertiban Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan pengelolaan Alokasi Dana desa Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan ketertiban Masyarakat Sosilassi dan pembinan dan ketertiban Masyarakat Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha Partisipasi masyarakat dalam pembanguan Pelaksanaan kegiatan pskikoraka Pelaksanaan kegiatan pskikoraka Pelaksanaan kegiatan pskikoraka Pelaksanaan kegiatan pskikoraka Pelaksanaan masalah sosial Pelaksanaan masalah sosial Pelaksanaan masalah sosial Pelaksanaan masalah sosial Pelaksanaan magalah sosial Pelaksanaan masalah sosial Pelaksanaan kegiatan pskikoraka Pelaksanaan masalah sosial Pelaksanaan pendataan masalah sosial Pelaksanaan pendataan masalah sosial Pelaksanaan pendata		Penyelesaian masalah batas desa	Belum tersedianya BBM untuk pelaksanaan tugas	12 bulan	Terselenggaranya pilkades dan BPD di kecamatan Dedai				
Penyelesaina administrasi kependudukan   Sosialisasi dan pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa   Desa   Pemattapan penyelenggaraan pemerintah desa   12 bulan   1	29.								Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian perselisihan
Peryelesian administrasi kependudukan 31. Sosialisasi dan pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 32. Pembinaan ketertiban 33. Pembinaan ketertiban 34. Pembinaan ketertiban 35. Masyarakat 36. Penyelesian masalah-masalah pengaduan 36. Masyarakat 37. Penyelesian masalah-masalah pengaduan 38. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 39. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna 39. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 39. Pelaksanaan masalah pengaduan 39. Pelaksanaan masalah pengaduan 39. Pelaksanaan masalah pengaduan 39. Pelaksanaan masalah pelaksananya beliminan dera dalam menggrakkan 39. Pelaksanaan masalah paskibraka 39. Pelaksanaan masalah pelaksananya beliminan dera dalam menggrakkan 39. Pelaksanaan masalah paskibraka 39. Pelaksanaan masalah paskibraka 39. Pelaksanaan masalah pengaduan 39. Pelaksanaan pengiminan POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 40. Pelaksanaan masalah pengadian pembinan bagi pengusaha 41. Pelaksanaan pendataan maniturn desa dan pengiminan POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 42. Pembinaan dan pengiminan POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 43. Pembinaan dan pengiminan POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 44. Pematapa penyelenggaraan pemerintah desa 45. Pelaksanaan pengadaan pengadaan 46. Pelaksanaan pengadaan 46. Pelaksanaan pengadaan 47. Pelaksanaan pelama pengadaan 48. Pelaksanaan pelama pengadaan 49. Pelaksanaan pengadaan 40. Pelaksanaan pelama pengadaan 40. Pelaksanaan pengadaan 40. Pelaksanaan pengadaan 40. Pelaksanaan pengadaan 40. Pelaksanaan pengadaan 41. Pelaksanaan pengadaan 41. Pelaksanaan pengadaan 42. Pembinaan dan monitoring terhadap pengadaan 43. Pembinaan dan pengadaan 44. Pelaksanaan pengadaan 45. Pelaksanaan pengadaan 46. Pelaksanaan pengadaan 46. Pelaksanaan pengadaan 47. Pelaksanaan pengadaan 48. Pelaksanaan pendataan pelama Peredada pengadaan 49. Pelaksan		Pemantapan TUPOKSI perangkat desa	Belum terselenggaranya pilkades dan BPD	12 bulan					
Sosialisasi dan pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 3.2. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa 3.3. Pembinaan ketemtraman dan ketertiban Alokasi Dana Desa 3.3. Pembinaan ketemtraman dan ketertiban Alokasi Dana Desa 3.4. Pemyelesian masalah-masalah pengaduan 3.5. Mayarakat Sosialisasi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan 3.6. Lathan dasar bagi anggota limas desa 3.7. Monitoring dan pembinaan dan kerhadap pempaduan Alokasi Dana Desa 3.8. Pembinaan dan ketertiban Alokasi Dana Desa Belum mantapnya pembinaan daministrasi kependudukan Kurangnya pembinaan bantuan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum mantapnya pembinaan administrasi kependudukan Kurangnya pembinaan bantuan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum mantapnya pembinaan administrasi kependudukan Kurangnya pembinaan bantuan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum mantapnya pembinaan administrasi kependudukan Kurangnya pembinaan bantuan desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum mantapnya pembinaan administrasi kependudukan Kurangnya pembinaan bantuan desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum mantapnya pembinaan administrasi kependudukan Kurangnya pembinaan bantuan desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum mantapnya pemplendaan daministrasi kependudukan Kurangnya pembinaan administrasi kependudukan Kurangnya pembinaan daminatirasi kependudukan Kurangnya pembinaan pembaragna pemberituan tiz bu	30.								Terlaksananya imbingan teknis (BIMTEK) bagi perangkat
Desa 32. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa 33. Pembinaan ketertitan 34. Penyelesian masalah-masalah pengaduan 35. Masyarakat 36. Latihan dasar bagi anggota linmas desa 37. Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha 38. Peritsipasi masyarakat dalam pembanguan 39. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 39. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 39. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 40. Pembinaan dan monitoring terhadap penjaman 41. Penbinaan dan monitoring terhadap pelajar 42. Pembinaan dan monitoring terhadap pelajar 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penjaman 44. Pembinaan dan monitoring terhadap penjaman 45. Pembinaan dan penjekenggaraan pemerintah desa 46. Perawasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Perawasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Pembana dan penjekenggaraan pemerintah desa 47. Data balai musenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan 48. Pembana dan penjekenggaraan pemerintah desa 49. Pembinaan dan penjengiman POK, gawai dayak dan sen pembanguan 49. Pembinaan dan penjenganan 49. Penbinaan dan penjenganan 40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 40. Penbinaan dan penjenganan 40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan penjengiman POK, gawai dayak dan sen pembanguan 44. Pembinaan dan penjengiman POK, gawai dayak dan sen budaya pelajar 45. Pembinaan dan penjengiman POK, gawai dayak dan sen pembinaan dan monitoring terhadap pengiman 46. Pembinaan dan penjenganan pendatan manfaat raskin dan BLT 47. Data bali musenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan 48. Pembanan dan penjenganan pendataan manfaat raskin dan BLT 48. Pembinaan dan penjenganan pendataan manfaat raskin dan BLT 49. Pembinaan dan penjengiman POK, gawai dayak dan sen penbanganan pendataan manfaat raskin dan BLT 49. Pembinaan dan penjengiman POK, gawai dayak dan sen penbangan PoK dan karang tarua 49. Pembinaan dan penjeniman POK, gawai dayak dan sen penbangan penjaman PoK dan karang tarua 49. Pembinaan dan penjaman pendat raskin dan BLT 49. Pembinaan dan			Perselisihan batas antara desa	12 bulan					
Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa   TuPOKSI   Kurangnya pembinaan administrasi kependudukan   Kurangnya pembinaan bantuan desa dan pengelolaan   Alokasi Dana Desa   Belum mantapnya penyelenggaraan pemerintah desa   Saislassi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan   Saislassi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan   Krangnya portimalnya pelayanan terhadap pengaduan   Krangnya optimalnya pelayanan terhadap pengaduan   Saismasyarakat dalam menjaga keamanan   Krangnya optimalnya pelayanan terhadap pengaduan   Saismasyarakat dalam menjaga keamanan   Saisma	31.		P.I	121.1	121. 1	121 1	421-1	401.1	
Kurangnya pembinaan administrasi kependudukan 34. Pembinaan ketemtraman dan ketertiban 35. Masyarakat 36. Latihan dasar bagi anggota linmas desa 36. Latihan dasar bagi anggota linmas desa 37. Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha 38. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 39. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 40. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 45. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Pembinaan an dan ketertiban 46. Varangnya pembinaan administrasi kependudukan 47. Rongnya pembinaan administrasi kependudukan 48. Rongnya pembinaan administrasi kependudukan 48. Kurangnya pembinaan administrasi kependudukan 48. Kurangnya pembinaan adam menjaga 49. Penyelesian masalah sesa 40. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 43. Manitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha 44. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 45. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 47. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 48. Perminaan dan monitoring terhadap penerima 49. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 41. Delah 12 bulan 42. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 43. Perminaan dan monitoring terhadap penerima 44. Manafat raskin dan BLT 45. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi 46. Untuk dan kermatan 47. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi 48. Terlaksananya perminaan pelam pengaduan masyarakat dalam menjaga 48. Pembinaan terhadap kegiatan peritah desa 49. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 43. Pembinaan dan monitor	22								
Pembinaan ketertiban  Kurangnya pembinaan bantuan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum mantapnya penyelenggaraan pemerintah desa Sosialisasi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan  Kurangnya partipasi mesyarakat dalam menjaga keamanan Kurangnya partipasi mesyarakat dalam menjaga keamanan  Kurangnya pitimalnya pengaduan  Terlaksananya penbutakan penbangana bagi tempata usah a partipasi masyarakat dalam menjaga keamanan  Terlaksananya pembunan la 12 bulan		Pemantapan penyelenggaraan pemerintan desa		12 bulan					
Alokasi Dana Desa Belum mantannya penyelenggaraan pemerintah desa Sosialisasi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan Kurangnya potimalnya pelayanan terhadap pengaduan menjaga latahan dasar bagi anggota linmas desa Krangnya optimalnya pembinaan bagi pengusaha Pelaksanaan kegiatan paskibraka Pelaksanaan kegiatan paskibraka Pelaksanaan pendataan masalah sosial Pelaksanaan pendataan	33.	Domhinaan katamtraman dan katartihan		12 hulan	12 bulan	12 hulan	12 bulan	12 hulan	
Penyelesian masalah-masalah pengaduan  35. Masyarakat Sosialisasi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan  36. Latihan dasar bagi anggota linmas desa  37. Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha  38. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  39. Pelaksanaan kegiatan paskibraka  Pelaksanaan kegiatan paskibraka  40. Pelaksanaan pendataan masalah-sosia  41. Pelaksanaan pendataan masalah sosia  42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima  44. Manifaar taskin dan BLT  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  45. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  47. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  48. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  49. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  40. Permasalahan perkebunan pengaduan mengagan pengusah a sola lelum optimalnya pengusah asi tingkat kecamatan pelajar  48. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  49. Pembangunan  40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial  40. Pembangunan  41. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  43. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  44. Manifaar taskin dan BLT  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  45. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  47. Pembangunan  48. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  Belum terhadap pengaduan menjaga data menggata hari Ubalan  Belum terhadap pengaduan  12 bulan  12 bula	34	i embinaan ketemuaman dan ketertiban		12 bulan					
35. Masyarakat Sosialisasi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan 36. Latihan dasar bagi anggota linmas desa	51.	Penyelesian masalah-masalah pengaduan		12 bulan					
Sosialisasi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan 36. Latihan dasar bagi anggota linmas desa 37. Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha 38. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 39. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna 40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 38. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 39. Pelaksanaan perhadap penerima 40. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 41. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 43. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 44. Manafaar Tarki dalam menjaga keamanan 45. Terlaksananya pembentukan FKB tingkat kecamatan 46. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 46. Pembangunan 47. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 48. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 49. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 40. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 40. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 41. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 43. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 44. Manafaar Tarki dalam menjaga 45. Latihan dasar bagi anggota limmas des 46. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan 46. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 47. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan 48. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan 49. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan 49. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 49. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan 49. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitul	35.		betain manapilya penyerenggaraan pemerintan aesa	12 001011	12 50.0	12 00.011	12 balan	12 00.011	Fremignatian penganan termatap penganan masyaranat
Action dasar bagi anggota linmas desa   Krangnya optimalnya pelayanan terhadap pengaduan nmasyarakat			Kurangnya partipasi mesyarakat dalam menjaga	12 bulan	Terlaksananya pembentukan FKB tingkat kecamatan Dedai				
masyarakat dalam pembinaan terhadap tempat usaha 38. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 39. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna 40. Pelaksanaan negatan paskibraka 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tigikat kecamatan 45. tingkat kecamatan 46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Pembanan dan pengiriman portumal pengirima	36.								Terlaksananya latihan dasar bagi anggota linmas desa
Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  38. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  40. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna  41. Pelaksanaan kegiatan paskibraka  42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima  44. Manifaat raskin dan BLT  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  45. Lingkat kecamatan  46. Pemasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  46. Pempasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  47. Pempasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  48. Pempasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  49. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna  40. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna  41. Pelaksanaan padinan masalah sosial  42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima  44. Manifaat raskin dan BLT  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  45. Lingkat kecamatan  46. Pembanganan kegiatan peringatah peringatan hagi pengusaha  46. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  46. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  47. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  Data hasil musrenbang disea menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  48. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  48. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan  Pelum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT  Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT  Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT  Belum o		Latihan dasar bagi anggota linmas desa	Krangnya optimalnya pelayanan terhadap pengaduan	12 bulan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
38. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 39. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna 40. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapituasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 47. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya pembinaan bagi pengusaha Belum optimalnya desa dalam menggerakkan perimgatan Hari Ulang Tahun 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 bulan 15 bulan 15 bulan 16 bulan 16 bulan 15 bulan 16 bulan 15 bulan 16 bulan 15 bulan 16 bulan 17 bulan 18 bulan 18 bulan 19 bulan 19 bulan 19 bulan 19 bulan 10 bulan 19 bula	37.		nmasyarakat						Terlaksananya monitoring dan pembinaan bagi tempat usaha
desa Kurangya optimalnya pembinaan bagi pengusaha 40. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna 40. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan menitoring terhadap penerima 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Pembanganan pendataan mengerakkan penghagan angalah sosial 84. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 45. Belum optimalnya pembinaan bagi pengusaha 86. Belum optimalnya pembinaan bagi pengusaha 12 bulan 1		Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha	Belum terbentuknya FKB tingkat kecamatan Dedai	12 bulan	Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan				
39. Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna 40. Pelaksanaan kegiatan paskibraka 41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  46. Belum optimalnya pembinaan bagi pengusaha Belum optimalnya desa dalam menggerakkan pembangan pengusaha Belum optimalnya desa dalam menggerakkan pembangan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Belum optimalnya pembinaan bagi pengusaha Belum optimalnya desa dalam menggerakkan pembangan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Belum optimalnya pembinaan bagi pengusaha Belum optimalnya desa dalam menggerakkan pembangan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Belum optimalnya pembinaan bagi pengusaha Belum optimalnya desa dalam menggerakkan pembanganan Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 bu	38.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan							
40. Pelaksanaan kegiatan paskibraka  41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial  42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar  43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima  44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  46. Pelaksanaan pendataan masalah sosial Belum optimalnya desa dalam menggerakkan pembangunan Belum optimalnya pembangunan Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 bulan 15 bulan 16 bundonesia 16 terdaksananya data penyandang masalah social 15 bulan 15 bulan 16 terdaksananya POR usia dini, gawai dayak dan sen 16 bulan 17 bulan 18 bulan 19 bulan 19 bulan 19 bulan 19 bulan 11 bulan 11 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 bulan 16 bulan 17 bulan 18 bulan 19 bulan									Terlaksananya pembinaan terhadap PKK dan karang taruna
41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Pembangunan Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Belum optimalnya PoR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Liz bulan 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 bu				12 bulan					
41. Pelaksanaan pendataan masalah sosial 42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  46. Pelaksanaan pendataan masalah sosial Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Belum optimalnya penserima Belum optimalnya penseriman portanian dikecamatan Belum optimalnya penseriman portanian dikecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  46. Pelaksanaan pendataan masalah sosial Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Belum optimalnya penseriman portanian penseriman penseriman portanian penseriman portanian penseriman portanian penseriman portanian penseriman p	40.	Pelaksanaan kegiatan paskibraka							
42. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar gawai dayak dan seni budaya pelajar gelum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar gelum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar gelum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar gelum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar gelajar Terlaksananya monitoring raskin Bantuan Langsung 12 bulan 13 bul		B11							
seni budaya pelajar  43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima 44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi 45. tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Teriaksananya monitoring terhadap penerima 16. Teriaksananya monitoring raskin Bantuan Langsung 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 bul				12 bulan					
43. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Pembinaan dan monitoring terhadap penerima manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 47. Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan Pembangungan yang kondusif di kecamatan Pelum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya penyandang masalah sosial Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya penyandang masalah sosial Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia	42.			12 bular	12 bular	12 bular	12 bular	12 hular	
44. manfaat raskin dan BLT Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. langkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. langkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 47. Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Terciptanya fasilitas dan koordinasi penyeler pembangungan yang kondusif di kecamatan raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Terciptanya fasilitas dan koordinasi penyeler raskin dan BLT Terciptanya fasilitas dan koordinas	43								remaksananya momtoring raskin bantuan Langsung Tunai
Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan  46. Belum tersedianya data musrenbang tingkat kecamatan Belum tersedianya data musrenbang tingkat kecamatan  12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 bulan 16 bulan 17 bulan 18 bulan 19 bulan				12 Duidii	12 Duidii	12 Duidii	12 Juidii	12 Duidii	Tersedianya dara hasil musrenhang tingkat kecamatan
45. tingkat kecamatan Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT Belum tersedianya data musrenbang tingkat kecamatan 12 bulan 13 bulan 15 bulan 15 bulan 16 bulan 17 teriptanya fasilitas dan koordinasi penyeler pembangungan yang kondusif di kecamatan Dedai	77.			12 hulan	rersectionly a dara masii musi embang emgkat ketdiliddil				
Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 46. Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan 42 bulan 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 b	45.			12 00.011	12.00.001	12 50	12 500001	12 50	Terciptanya fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan
46. Belum tersedianya data musrenbang tingkat kecamatan 12 bulan 15 bulan 16 bulan 16 bulan 16 bulan 16 bulan 17 bulan 18 bulan 1	1 -			12 bulan					
	46.								
1.47   Dombinous technique menusculut menuscului				12 bulan	Terlasananya pengelolaan pembangunan dibidang ekonomi				
	47.	Pembinaan terhadap masyarakat, pengusaha,				1			
pengurus koperasi dan lain-lainya		pengurus koperasi dan lain-lainya			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>

## Rencana Strategis Kecamatan Dedai 7ahun 2016-2021

	Monitoring bantuan pembangunan social, kesehatan,	Belum terciptanya fasilitas dan koordinasi	12 bulan	Terlaksananya pengendalian dan monitoring bantuan				
48.	pendidikan ekonomi	penyelenggaraan pembangunan yang kondusif di						pembangunan dan saranaq prasarana di wilayah kiecamatan
		kecamatan Dedai	12 bulan	Dedai				
	Monitoring pelaksanaan penarikan pajak bumi dan	Belum optimalnya pembinaan pembangunan bidang						Terlaksananya realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
49.	bangunan (PBB)	ekonomi						100%
	Pengelolaan data di bidang ekonomi dan	Belum optimalnya pengendalian dan monitoring bantuan	12 bulan	Tersedianya data di bidang ekonomi dan pembangunan				
50.	pembangunan	pembangunan dan sarana prasarana diwilayah						
	Sosialisasi undang-undang perizinan/Paten	kecamatan Dedai	12 bulan	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi tentang				
51.		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak						perizinan/paten
	Pembangunan sanitasi dan taman kantor	bumi dan bangunan (PBB)	12 bulan					
52.		Belum terpenuhnya desa di bidang ekonomi dan						Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat
	Inventarisasi perizinan di wilayah kecamatan Dedai	pembangunan	12 bulan					
53.		Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat						Terlaksananya peningkatan pendapatan asli daerah
		tentang perizinan/paten	12 bulan					
54.		Belum tersedianya sanitasi dan taman lingkungan kantor						
		Belum optimalnya upaya peningkatan asli daerah						

# BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Renstra tahun 2016-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan Dedai tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan Pelayanan Prima kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dedai lima tahun ke depan.

Rancangan Renstra Kecamatan Dedai tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh pegawai Kecamatan Dedai. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Kecamatan Dedai untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Kecamatan Dedai tahun 2016-2021.

Dedai, 1 Juni 2016

0621 199003 1 006

KECAMATAN